

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN



KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, rencana kerja (Ranwal) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2026 telah selesai disusun. Rencana kerja tahun 2026 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD selama tahun 2026. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja tahun 2026 ini. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan Renja ini, harapan kami adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.



Tabanan, 26 Agustus 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

I. Made Subagia, S.Pi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Awal (Ranwal) Dinas Pertanian merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2026 yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Tabanan. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Dinas Pertanian masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Pertanian. Penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian merupakan tanggung jawab masing-masing kepala Dinas Pertanian yang proses penyusunannya mengacu pada rencana kerja awal RKPD, untuk itu Dinas Pertanian membentuk tim penyusun Renja Dinas Pertanian yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian sampai dengan penyusunan RKA- OPD. Diharapkan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan OPD secara berkelanjutan.

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian nantinya diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian dalam arti luas.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka secara substansial kebijakan pembangunan

yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Artinya apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas dapat lebih optimal.
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjadi prioritas penanganan di tahun 2026.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan politik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2026 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
- n. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
- o. Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);

- q. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);
- r. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2026 adalah:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan pertanian Daerah Kabupaten Tabanan
4. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2026 serta dana yang dibutuhkan.
5. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan guna menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rencana kerja awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rencana kerja awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas

OPD pada tahun anggaran berkenaan. Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja adalah:

- Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD.
 - Analisis pelayanan OPD
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - Rivew terhadap rencana kerja awal RKPD
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Garis besar isi Rencana Kerja dan kegiatan Masyarakat:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Rivew Terhadap Rencana kerja awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan

Adapun capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi tahun 2023	Target Tahun 2026	Akhir Renstra
1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	85,18%	100%	100%
2.1	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Padi: (-0,12%) Jagung: (-0,16%) Kedelai: (186,1%)	10%	10%
2.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Padi: (-0,013%) Jagung: (25,53%) Kedelai (21,66%)	10%	10%
2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	96,6%	100%	100%

2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	63,57%	65%	65%
-----	--	--	--------	-----	-----

Sumber: Data diolah

Analisis hasil capaian kinerja program menurut hasil LKjIP Tahun 2023

Sasaran 2.1 Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Dari sasaran meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan, dengan indikator persentase peningkatan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dengan menggunakan formula $\text{Produksi tahun 2023 dikurangi produksi tahun 2022}$, kemudian selisih ini dibagi dengan produksi tahun 2022.

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Produksi Tanaman Pangan

Komoditas Pertanian	Produksi Tahun 2021 (ton)	Produksi Tahun 2022 (ton)	Produksi Tahun 2023 (ton)	Persentase Peningkatan Produksi(%)
Padi	197.933	210.095	184.883	-0,12%
Jagung	12.713	14.680	12.262	-0,16%
Kedelai	395	639	1.828	186,1%

Sumber: Data Diolah

Produksi padi tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2022. Dengan persentase penurunan produksi sebesar 0,12%. Begitu pula dengan komoditas unggulan lainnya jagung. Dimana jagung juga mengalami penurunan produksi. Dimana jagung menurun sebesar 0,16 persen. Hal ini karena adanya kekeringan dan kemarau panjang yang menyebabkan penanaman tertunda. Disamping itu karena adanya panen muda jagung, sehingga turut mengurangi jumlah produksi jagung. Untuk komoditas kedelai mengalami peningkatan sebesar 186,1 persen. Hal ini karena sepanjang tahun 2023 terdapat

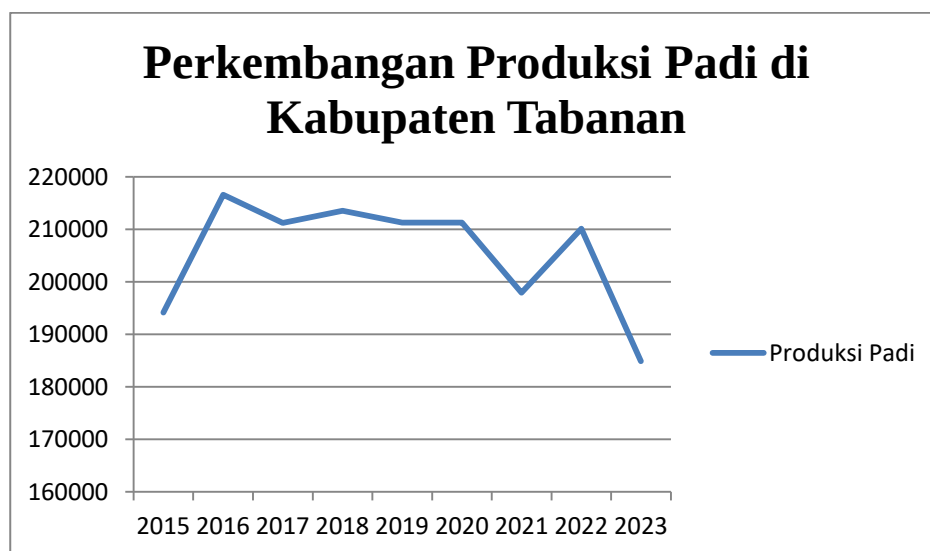
proyek tanam komoditas kedelai sebesar 907 Ha yang ditanam di kecamatan Tabanan seluas 650 Ha, di kecamatan Kediri seluas 257 Ha, sedangkan di Baturti ditanam secara swadaya seluas 2 Ha.

Tabel 3.3 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Komoditas Unggulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Padi (ton)	194.122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095	184.883
Jagung (ton)	5.035	7.369	8.691	8.901	8.691	1.440	12.713	14.680	12.262
Kedelai (ton)	679	1.280	1.107	2.411	1.896	153	395	639	1.828

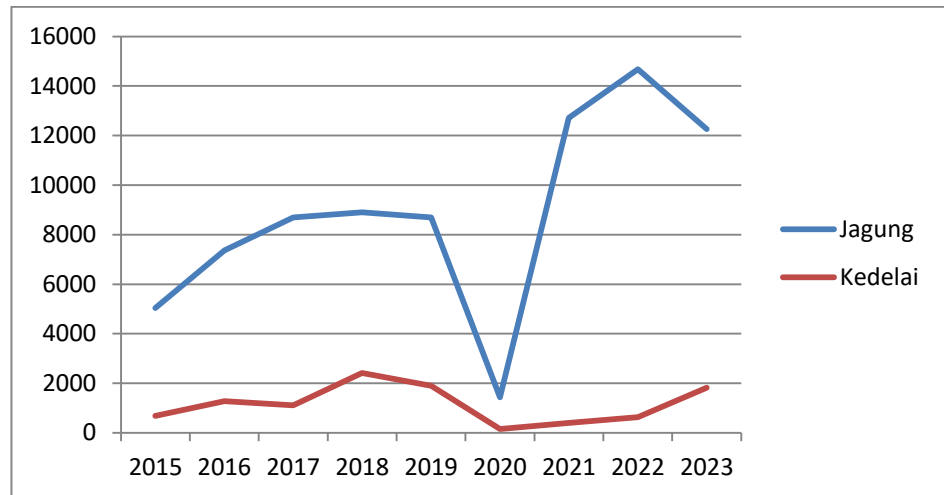
Secara umum produksi padi, jagung dan kedelai kalau dituangkan ke dalam grafik perkembangan produksi seperti grafik dibawah.

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Untuk produksi komoditas perkebunan sesuai dengan data pada tabel dibawah

3.4 Tabel Produksi Komoditas Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	Luas Areal Tanaman Menghasilkan (Ha)			Produksi (Ton)			Persentase Peningkatan Produksi
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	KELAPA HYBRIDA	2,00	2,00	2,00	1,27	0,30	1,39	3,63
2	KELAPA GENJAH	330,75	342,63	342,63	244,79	251,36	258,51	0,03
3	KELAPA DALAM	12.901,00	12.911,50	13.038,50	14.918,66	15.165,29	15.126,87	0,00
4	KAKAO	3.303,87	3.342,97	3.710,97	878,70	942,06	1.048,54	0,11
5	KOPI ARABIKA	705,55	600,55	450,55	27,30	24,14	23,02	-0,05
6	KOPI ROBUSTA	8.253,60	8.387,08	8.537,08	5.589,12	5.327,27	5.062,25	-0,05
7	CENGKEH	1.825,41	1.854,81	1.854,81	163,02	145,05	170,64	0,18
8	PANILI	-	-	-	-	-	-	-
9	LADA	-	-	-	-	-	-	-
10	KEMIRI	16,20	20,74	20,74	10,34	11,04	11,54	0,05
11	PALA	11,06	38,56	38,56	8,50	8,80	8,89	0,01
12	AREN	110,11	110,11	110,11	8,63	9,45	98,73	9,45

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Secara umum produksi komoditas perkebunan pada tahun 2023

mengalami peningkatan dari tahun 2022. Hanya kopi Arabica dan kopi robusta yang mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk komoditas lain secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Terutama kelapa hybrid yang meningkat 3,63% dan aren sebesar 9,45%. Beberapa komoditas perkebunan lain mengalami peningkatan produksi akan tetapi persentase peningkatannya tidak mencapai satu persen.

Sasaran 2.1 Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Dari sasaran peningkatan prasarana dan sarana pertanian dengan indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dimana didapat dari perhitungan produktivitas tahun berlaku di kurangi produktivitas tahun sebelumnya, dibagi dengan produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Dimana hasil perhitungan produktivitas tanaman pangan sesuai dengan table dibawah

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Produktivitas Tanaman Pangan

Komoditas Pertanian	Produktivitas Tahun 2022 (kw/ha)	Produktivitas Tahun 2023	Persentase Peningkatan Produktivitas
Padi	57,81	57,08	-0,013%
Jagung	58,60	73,56	25,53%
Kedelai	16,53	20,11	21,66%

Sumber: Data Statistik Pertanian

Produktivitas padi dipengaruhi oleh luas tanam padi. Dimana sepanjang tahun 2023 luas tanam padi mengalami penurunan akibat adanya kekeringan dan kemarau panjang, sehingga penanaman tidak dapat dilaksanakan. Juga terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 1.696 Ha dan proyek tanam kedelai seluas 909 Ha dan proyek Bawang merah seluas 20 Ha di Kediri, Bawang putih seluas 20 Ha yang dilaksanakan di kecamatan Penebel, proyek cabe di kecamatan Baturiti seluas 30 Ha, dan di kecamatan Marga seluas 10 Ha. Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis

varietas, penggunaan pupuk kurang tepat.

Jagung mengalami peningkatan produktivitas karena lokasi pengambilan ubinan yang mendukung, penggunaan pupuk berimbang, system perawatan yang intensif.

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan yang kaya protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak. Selain sebagai sumber protein nabati, kedelai merupakan sumber lemak, mineral, dan vitamin serta dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti tahu, tempe, tauco, kecap, dan susu. Untuk produktivitas komoditas kedelai, produktivitas mengalami peningkatan karena adanya bantuan pemerintah, penggunaan benih bermutu, pembuatan saluran drainase, pengaturan populasi, pengendalian OPT, pengolahan lahan yang baik dan pemupukan sesuai kebutuhan.

Tabel 3.6

Data Series Perkembangan Padi di Kab. Tabanan

No	URAIAN	Tahun													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	L. Tanam (Ha)	44.701	41.411	40.916	42.827	32.600	33.040	46.084	37.386	36.855	34.783	37.075	37.882	33.091	31.625
	L Panen Bersih	41.637	40.789	39.415	41.612	36.892	32.374	39.603	36.809	36.840	37.266	33.065	36.864	34.903	31.130
	Produktivitas	56,10	52,09	56, 49	56,16	58,07	59,96	56,10	57,37	58,04	55,81	64.24	53,75	57,81	57,08
	Produksi (Ton	233.60 2	212.48 1	222.65 9	233.69 0	214.20 3	194.122	216.54 7	211.17 8	213.48 2	211.24 3	211.24 3	197.93 3	210.09 5	184.88 2
2	Produksi Beras	102.23 5	107.62 9	112.66 5	118.25 1	111.39 4,10	104.766	115.24 9	113.96 9	113.40 5	112.21 6	112.78 4	105,17 7	113.39 1	115.99 5
	Kebutuhan	60.450	61.978	63.052	63.271	56.322	49.700	49.700	50.281	50.281	50.281	50.817	51.421	51.000	44.757
	Surplus Beras	41.785	45.651	49.613	54.980	49.440	48.451	58.770	56.870	58.096	56.906	56.885	48.614	55.773	68.887

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Untuk persentase peningkatan produktivitas hasil perkebunan dengan menggunakan formula produktivitas tahun 2023 dikurangi produktivitas 2022, kemudian selisih ini dibagi dengan produktivitas tahun 2022.

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Produktivitas Komoditas Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	PRODUKTIVITAS (KG/HA)			Persentase Peningkatan Produktivitas (%)
		2021	2022	2023	
1	KELAPA HYBRIDA	635	150	695	3,63
2	KELAPA GENJAH	740	734	754	0,03
3	KELAPA DALAM	1.198	1.175	1160	-0,01
4	KAKAO	274	282	283	0,00
5	KOPI ARABIKA	27	40	51	0,28
6	KOPI ROBUSTA	690	635	593	-0,07
7	CENGKEH	147	78	92	0,18
8	PANILI	0	0	0	0
9	LADA	0	0	0	0
10	KEMIRI	554	532	556	0,05
11	PALA	212	228	231	0,01
12	AREN	92	86	897	9,43

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Dari tabel dapat dilihat bahwa hampir semua produktivitas komoditas perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2022. Hanya kelapa dalam dan kopi robusta yang mengalami penurunan produktivitas. Hal ini disebabkan karena kualitas bibit yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk. Komoditas aren meningkat 9,43% dibandingkan dengan tahun 2022. Begitu pula dengan kelapa hybrida meningkat sebesar 3,63%. Untuk komoditas lain seperti kelapa genjah, kakao, kopi Arabica, cengkeh, kemiri dan pala juga mengalami peningkatan produktivitas. Hanya saja peningkatannya tidak mencapai satu persen. Hal ini karena iklim yang tidak mendukung di tahun 2023, dan adanya anomaly iklim. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang telah

dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dialami terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman yang masih rendah antara lain pemangkasan belum intensif, pengendalian OPT belum optimal, sanitasi kebun belum optimal, pemupukan belum maksimal, tanaman sudah tua dan kurang peremajaan. Langkah-langkah pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Peremajaan dan intensifikasi tanaman kakao
- Pengawasan dan pendampingan
- Pengendalian OPT dan penerapan PHT
- Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan
- Indikasi geografis
- Pemberdayaan petugas pengamat OPT
- Agroindustri komoditi kakao
- Pemasaran, akses pasar, dan pelayanan informasi pasar
- Pembinaan usaha komoditi kakao
- Sistem jaminan mutu
- Melakukan promosi

Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023

Berdasarkan data, dapat diamati bahwa sepanjang tahun 2023, Dinas Pertanian mengalokasikan tiga jenis pupuk yaitu Urea, NPK dan NPK Formula Khusus sesuai dengan yang tercantum dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Dimana komoditas yang termasuk diantaranya Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe.

**Tabel 3.8 DATA REALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 (PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2023)**

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (kg)								
		Urea			NPK			NPK Formula Khusus		
		Alokasi	Realisasi	% Real	Alokasi	Realisasi	% Real	Alokasi	Realisasi	% Real
1	Selemadeg Barat	510.600	185.200	36,27	243.000	133.600	54,98	326.000	72.850	22,35
2	Selemadeg	1.042.446	426.600	40,92	749.097	352.850	47,10	23.299	1.750	7,51
3	Selemadeg Timur	1.050.900	564.802	53,74	1.094.717	587.926	53,71	4.699	-	-
4	Kerambitan	1.007.172	678.657	67,38	1.130.049	760.491	67,30	-	-	-
5	Tabanan	1.027.761	649.185	63,16	776.600	518.244	66,73	-	-	-
6	Kediri	1.290.365	1.071.212	83,02	1.024.700	863.429	84,26	-	-	-
7	Marga	913.600	608.450	66,60	789.300	524.862	66,50	-	-	-
8	Baturiti	982.000	533.650	54,34	741.800	416.750	56,18	-	-	-
9	Penebel	1.556.000	1.245.250	80,03	1.342.200	969.900	72,26	-	-	-
10	Pupuan	273.000	191.723	70,23	502.700	193.850	38,56	-	-	-
	Jumlah :	9.653.844	6.154.729	63,75	8.394.163	5.321.902	63,40	353.998	74.600	21,07

Pembangunan prasarana yang dilakukan sepanjang tahun 2023 yakni sesuai tabel dibawah:

Tabel 3.9 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2023

No	Jenis Prasarana	Jumlah Pembangunan
1	Pembangunan Jalan Produksi Peternakan	1 Paket
2	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1 Paket
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura	1 Paket
4	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi	1 Paket
5	Pembangunan/ Rehabilitasi Dam Parit	1 Paket
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	2 Paket
7	Perbaikan Jalan Usaha Tani	1 Paket
8	Rabat Beton Jalan Usaha Tani	1 Paket
9	Pengadaan mesin Slip	1 Paket
	Pengadaan Traktor	2 Paket
10	Pengadaan alat Pertanian	1 Paket

Sasaran 2.3 Meningkatkan Produktivitas Peternakan

Dari sasaran Meningkatkan Produktivitas Peternakan dengan indikator persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Dalam hal pelayanan kesehatan hewan selain dilakukan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan, juga dilakukan pemberian obat-obatan untuk ternak sapi di kelompok ternak serta melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku. Munculnya penyakit kuku dan mulut pada bulan Juli 2022 sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan. Arahan dari menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan Satgas PMK bahwa sebelum pelaksanaan G20 tanggal 13 November 2022 pelaksanaan cakupan vaksinasi PMK sudah mencapai 80% pada hewan rentan PMK (sapi, kerbau, kambing dan babi).

Rabies adalah salah satu penyakit yang bersifat zoonosis atau dalam kata lain bisa menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Tak hanya menyerang anjing, tetapi mamalia berdarah panas juga memiliki risiko tinggi dalam penularan penyakit rabies ini. Rabies ini bisa menyerang hewan sejak lahir. Maka dari itu, perlu dilakukan vaksinasi rabies sejak dini demi mencegah terjangkitnya virus tersebut bagi para hewan peliharaan. Tingkat efektivitas vaksin rabies ini 100%, sehingga sangat penting dilakukan sebagai langkah awal pencegahan rabies.

Tabel 3.10 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

KECAMATAN	POPULASI ANJING	HASIL VAKSINASI Rabies				Cakupan
		ANJING	KUCING	MONYET	TOTAL VAKSINASI	(%)
Baturiti	5.500	4.462	0	0	4.462	81,13
Kediri	7.917	6.318	63	0	6.381	79,81
Kerambitan	6.764	5.882	18	0	5.900	86,96
Marga	4.934	4.702	18	0	4.720	95,30
Penebel	6.974	5.545	1	0	5.546	79,51
Pupuan	6.902	3.433	173	1	3.607	49,74
Selemadeg	4.359	3.055	35	0	3.090	70,09
Selemadeg Barat	6.124	3.946	15	0	3.961	64,44
Selemadeg Timur	4.326	3.862	65	0	3.927	89,27

Tabanan	8.304	5.296	36	0	5.332	63,77
TOTAL	62.104	46.501	424	1	46.926	74,88

Sumber: Statistik Peternakan

Hasil Vaksinasi PMK

Tabel 3.11 Hasil Vaksinasi PMK Pada Kambing

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi			Total Vaksinasi
				I	II	Boster	
1	Tabanan	Baturiti	66				
2	Tabanan	Kediri	144				
3	Tabanan	Kerambitan	33				
4	Tabanan	Marga	374				
5	Tabanan	Penebel	280				
6	Tabanan	Pupuan	431	160	14		174
7	Tabanan	Selemadeg	309	7			7
8	Tabanan	Selemadeg Barat	305				
9	Tabanan	Selemadeg Timur	1.170	4			4
10	Tabanan	Tabanan	1.384				
		TOTAL	4.496	171			185

Tabel 3.12 Hasil Vaksinasi Sapi

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi			Total Vaksinasi
				I	II	Boster	
1	Tabanan	Baturiti	12.325	2.005	5.397	96	7.498
2	Tabanan	Kediri	5.997	568	220	1.322	2.110
3	Tabanan	Kerambitan	3.607	1.154	961	540	2.655
4	Tabanan	Marga	1.713	954	2.444	1.030	4.428
5	Tabanan	Penebel	1.073	943	4.797	0	5.740
6	Tabanan	Pupuan	1.713	37	128	36	201
7	Tabanan	Selemadeg	3.008	557	648	4	1.209
8	Tabanan	Selemadeg Barat	4.688	371	368	0	739
9	Tabanan	Selemadeg Timur	4.172	519	1.032	0	1.551
10	Tabanan	Tabanan	433	789	180	553	1.522
		TOTAL	38.729	7.897	16.175	3.581	27.653

Tabel 3.13 Hasil Vaksinasi Babi

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi			Total Vaksinasi
				I	II	Boster	
1	Tabanan	Baturiti	13.670	5.350			5.350
2		Kediri	7.599	2.652			2.652
3		Kerambitan	3.959	2.836			2.836
4		Marga	3.550	3.850			3.850
5		Penebel	2.167	3.376			3.376
6		Pupuan	3.728				
7		Selemadeg	3.572				
8		Selemadeg Barat	3.145				
9		Selemadeg Timur	1.597	600			600
10		Tabanan	1.317	1.909			1.909
		TOTAL	44.304	20.573			20.573

Tabel 3.14 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

NO	JENIS TERNAK	PERKEMBANGAN POPULASI		KETERANGAN NAIK/TURUN %
		2022 (ekor)	2023 (ekor)	
1	Sapi	38.729	38.988	Naik 0,67%
2	Kerbau	49	71	Naik 44,89 %
3	Kuda	0	9	Naik 100 %
4	Babi	44.304	31.903	Turun 27,93 %
5	Kambing	4.296	2.049	Turun 52,30 %
6	Ayam Buras	261.613	242.464	Turun 7,32 %
7	Ayam Ras Petelur	836.200	1.233.300	Naik 47,47 %
8	Ayam Ras Pedaging	2.224.683	1.859.900	Turun 16,39 %
9	Itik	51.255	46.734	Turun 8,82%

Sumber: Statistik Peternakan

Beberapa alasan peningkatan dan penurunan populasi ternak antara lain:

1. Ternak Sapi meningkat karena:
 - Meningkatnya minat petani peternak untuk memelihara ternak sapi
 - Ketersediaan pakan dan hijauan banyak tersedia dan adanya bantuan pemerintah untuk membantu petani dan kelompok ternak dalam hal pengadaan bibit sapi.

- Adanya terobosan pemerintah dalam perlindungan petani melalui program asuransi yang disubsidi oleh pemerintah sehingga petani ternak bisa terlindungi dari kerugian beternak
 - Pelayanan kesehatan hewan terutama vaksinasi PMK sudah dilaksanakan secara rutin.
2. Ternak Kerbau meningkat karena: Ketersediaan pakan dan hijauan banyak tersedia
 3. Ternak Kuda meningkat karena bergeliatnya sektor pariwisata setelah pandemic covid 19 sehingga pemeliharaan kuda adalah untuk menunjang pariwisata untuk rekreasi wisata alam
 4. Ternak Babi turun karena masih rentannya penyakit pada babi dimana banyak perusahaan dan peternak babi belum berani memelihara babi dalam jumlah besar.
 5. Ternak Kambing turun karena pemeliharaan kambing hanya ada di daerah pegunungan terutama di daerah selemadeg raya dan pupuan serta masih adanya penyakit pada kambing dan pemeliharaan ternak kambing masih bersifat sambilan
 6. Ternak Ayam Buras turun karena lahan pemeliharaan ayam buras berkurang dan vaksinasi ND belum dilaksanakan secara rutin
 7. Ternak Ayam Petelur naik karena disebabkan harga telur yang meningkat mahal sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak serta adanya beberapa peternak yang mengalami peningkatan volume pemeliharaan yang menunjang pendapatan sehari-hari
 8. Ternak Ayam Pedaging Turun karena tidak stabilnya harga pakan dengan harga ayam hidup sehingga fluktuasi harga terlalu cepat sehingga peternak mengurangi volume pemeliharaan serta masih adanya pasokan daging dari perusahaan di luar bali sehingga berpengaruh terhadap harga ayam di Bali
 9. Ternak itik turun karena
 - Harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga berat hidup itik.
 - Pemeliharaan itik berskala besar tidak ada lagi karena memerlukan lahan luas dan bau masih menjadi permasalahan dasar bagi peternak
 - Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak itik ke

sektor lain yang menunjang pendapatan sehari-hari.

Secara umum faktor yang dirasa menghambat pengembangan peternakan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

Upaya yang ditempuh antara lain:

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak penyakit rabies perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dengan melibatkan jajaran dinas dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan.
2. Perlu dilakukan penertiban terhadap penjual obat hewan yang tidak memiliki ijin dari dinas teknis dan memasarkan obat yang kadaluarsa.
3. Untuk menumbuhkan kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi secara terus-menerus baik melalui jalur formal maupun informal.
4. Pemotongan babi diluar RPH belum mempunyai penampungan limbah, disarankan untuk melakukan pemotongan di RPH sesuai dengan Perbub. Nomor 67 Tahun 2013.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Dinas Pertanian melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan. Pemeriksaan ini

mengeluarkan sertifikat Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Tahun 2022 jumlah SKKH yang dikeluarkan dapat dilihat dari tabel:

Tabel 3.15 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan

NO	TAHUN	JUMLAH SKKH	JUMLAH BAP	KETERANGAN
1	Tahun 2023	659	0	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan. Untuk tahun 2023, hanya mengeluarkan SKKH saja
2	Jumlah 2022	8	268	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
3	Jumlah 2021	0	263	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
4	Jumlah 2020	716	110	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku, Daging olahan

Diharapkan dengan pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner meningkatkan derajat hewan di Kabupaten Tabanan.

Sasaran 2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Perwujudan sasaran ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani.

Tahun 2023 penyuluh membina seluruh subak sawah, subak abian, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok wanita tani, gapoktan dan forum poktan dengan jumlah 236 subak sawah, 186 subak abian, 1.682 kelompok

tani, 596 kelompok tani ternak, 72 Kelompok Wanita Tani, 254 gapoktan dan 20 forum poktan, rata-rata penyuluh membina poktan 18 poktan yang aktif (kisaran 16-20 poktan) Setiap penyuluh membina secara intensif 9 poktan untuk peningkatan kelas kemampuan kelompok (kisaran 5-10 poktan, ketentuan dari kemenpan) sehingga diperoleh target $9/18 \text{ dikalikan } 100\% = 50\%$

Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Perwujudan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun 2022 secara fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 97 %. Hal ini dapat tercapai karena Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, Terlaksananya demplot pupuk hayati cair, untuk meningkatkan hasil petani yang berdampak pada penghasilan petani, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 97,84 % karena Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya program Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan dan tercapainya target 1 juara tingkat Kabupaten mewakili ke untuk tingkat Propinsi Untuk Tahun 2022.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun 2023 (jumlah tahun 2022 + 2023)	Capaian								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
							TRIWUL AN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWUL AN IV									
1	2	3	4	5		8				9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100 %		15
				K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
		Dinas Pertanian		100%	199.7 75.32 8.535			4.170. 933.15 8		8.439.9 57.475, 00		6.912.61 3.931,00		3.797. 603	0	12.442 .426.7 05,00	100 %	87.686. 451.39 1,00	100	44%		
1	Peningkat an Nilai Akuntabili tas Kinerja Pemerinta h Daerah	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AH DAERAH KABUPATE N/ KOTA	Persentase terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	164.6 39.65 2.260		3 0 %	4.161. 220.65 8	60%	7.189.8 18.475, 00		5.052.90 7.007,00		3.797. 603	90 %	11.182 .575.2 05,00	190 %	56.607. 376.97 9,00	190	34%	Distan	

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50.000.000		20%	0	0	0		1.103.300	3.797.603	20%	0	0,2	8.319.850,00	20	17%	Distan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	27.500.000			0				1.103.300,00		0		4	4.981.533,00	40	18%	Distan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	5	22.500.000			0						0		2	3.338.317,00	40,0%	15%	Distan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	151.924.088.605		30%	3.992.756.790	30%	6.770.508.661		4.867.946.350	0	60%	10.763.265.391	160%	53.490.584.538,00	160,0%	35%	Distan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	144	151.756.956.495			3.992.756.790	144	6.770.508.661		4.867.946.350		144	10.763.265.391	288	53.458.925.972,00	200,0%	35%	Distan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	10	121.550.625			0		0				0		4	27.650.480,00	40,0%	23%	Distan

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan keuangan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (laporan)	10	45.58 1.485		0	0	0					0		4	4.008.0 86,00	40,0%	9%	Distan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.711. 494.0 30		3 0 %	2.886. 000	6.782.1 00		46.864.2 92		0	30 %	6.782. 100	130 %	210.36 6.431,0 0	130,0 %	12%	Distan
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	60	34.51 0.350				0					0		24	2.112.1 01,00	40,0%	6%	Distan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan (paket)	60	27.01 2.805				0					0		24	3.243.0 53,00	40,0%	12%	Distan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)(	60	323.8 45.59 5			2.886. 000	6	6.782.1 00				6	6.782. 100	30	86.691. 464,00	50,0%	27%	Distan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)	60	68.58 8.705				0					0		24	6.547.7 47,00	40,0%	10%	Distan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (paket)	60	19.10 0.815		0	0	0					0		24	-	40,0%	0%	Distan

		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	60	671.199.510				0		40.562.500,00			0	24	83.800.894,00	40,0%	12%	Distan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)	60	567.236.250				0		Rp6.301.792,00			0	24	27.971.172,00	40,0%	5%	Distan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0					0					
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD										0						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin						0				0	0					
		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	9.405.893.625	30%	206.763.178	60%	438.466.028		123.244.265	0	30%	479.651.338	130%	2.784.326.334,00	130,0%	30%	Distan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat Menyurat (laporan)	60	53.309.020			5	1.870.000		3.960.000		5	1.870.000	29	18.400.000,00	48,3%	35%	Distan

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan (Paaket)	120	1.741.209.665		41.185.310	6	24.068.314		37.363.853		6	65.253.624	54	341.629.429,00	45,0%	20%	Distan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (paket)	60	7.611.374.940		165.577.868	6	412.527.714		81.920.412		6	412.527.714	30	2.424.296.905,00	50,0%	32%	Distan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.548.176.000	30%	6.864.000	60%	14.916.000		13.748.800	0	30%	14.916.000	130%	195.819.450,00	130,0%	13%	Distan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	250	648.176.000		6.864.000		14.916.000		13.748.800		0	14.916.000	100	139.721.930,00	40,0%	22%	Distan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)	200	900.000.000				0				0	0	80	56.097.520,00	40,0%	6%	Distan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya																

2	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	10%	14.09 0.714. 055		0	0		554.791 .000		699.834. 882		0	0	554.79 1.000	10%	16.099. 092.71 7,00	100,0 %	114 %	Distan
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	70%	13.44 4.746. 310		0	0	0	55.092. 500		326.211. 982		0	0	55.092 .500	0,5	11.790. 772.40 1,00	71,4 %	88%	Distan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	5	7.222. 373.1 55				0	52.772. 500		305.032. 982			0	52.772 .500	2	11.566. 060.28 6,00	40,0%	160 %	Distan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	5	6.222. 373.1 55				0	2.320.0 00		21.179.0 00			0	2.320. 000	2	224.71 2.115,0 0	40,0%	4%	Distan
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya (jenis)	6	630.5 43.86 5		0	0	0	937.000		8.055.50 0		0	0	937.00 0	2	252.21 5.477,0 0	33,3 %	40%	Distan

		Kota																		
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian(VUB)	20	630.543.865			0	475.000					0	475.000	4	62.957.613,00	20,0%	10%	Distan
		Pemanfaatan SDG Hewan tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (jenis)	20	0			0	462.000		8.055.500			0	462.000	4	189.257.864,00	20,0%	#DIV/0!	Distan
		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak (ekor)	15	15.423.880		0	0	0	498.761.500	365.567.400		0	0	498.761.500	15	4.056.104.839,00	100,0%	26298%	Distan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (paket)	195	15.423.880				16	498.761.500	365.567.400			16	498.761.500	94	4.056.104.839,00	48,2%	26298%	Distan
3	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARAN	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	10%	18.846.577.320		0	159.712.500	0	813.862.500	665.259.892		0	0%	973.575.000	10%	13.503.070.044,00	100,0%	72%	Distan

		A PERTANIA N																			
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	2.223.594.425		30%	150.000.000	40%	63.925.000		10.542.300		0	70%	213.925.000	122%	2.420.451.708,00	203,3%	109%	Distan
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (dokumen)	5	0									0			2	22.878.003,00	40,0%	#DIV/0!	Distan
		Koordiansi Sinkronisasi Prsarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordiansi Sinkronisasi Prsarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	20	2.223.594.425			150.000.000	2	63.925.000		10.542.300			2	213.925.000	10	2.355.745.366,00	50,0%	106%	Distan
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Komoditas Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Pertanian (tahun)	5	0									0			2	41.828.339,00	40,0%	#DIV/0!	Distan
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik (unit)	157	16.622.982.895		30%	9.712.500	60%	749.937.500		654.717.592		0	90%	759.650.000	77,9	11.082.618.336,00	49,6%	67%	Distan
		Pembangunan , Rehabiitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	500	8.622.982.895									0			82	2.882.120.449,00	16,4%	33%	Distan

		Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	360	8.000.000.00			9.712.500	749.937.500	654.717.592			0	759.650.000	22	8.200.497.887,00	6,1%	103%	Distan
		Pembangunan Rehabilitasi Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah jalan rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)							51.434.868									
4	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	1.315.351.410			0	1.440.000	9.717.700		0	0	1.440.000	0,96	870.602.054,00	96,0%	66%	Distan
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (ekor)	21.000	1.092.002.135		0	0	0	0		0	0	0	8000	830.028.752,00	38,1%	76%	Distan

		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	5	1.092.002.135									0		2	830.028.752,00	40,0%	76%	Distan
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.942.500		8.082.500		195.049.200				10.025.000					
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	150	223.349.275	0	0	0	1.440.000		9.717.700		0	0	1.440.000	110	40.573.302,00	73,3%	18%	Distan
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan (UUP)	40	223.349.275				1.440.000		9.717.700			0	1.440.000	0	40.573.302,00	0,0%	18%	Distan
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	45%	883.033.490	32%	0	32%	163.773.030		484.894.450		0	64%	163.773.030	89%	1.040.037.127,00	197,8%	118%	Distan
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	45%	883.033.490	32%	0	32%	163.773.030		484.894.450		0	0,64	163.773.030	89%	1.040.037.127,00	197,8%	118%	Distan

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	11	883.033.490				8.587.000		108.472.000			0	8.587.000	22	403.096.601,00	200,0%	46%	Distan
		Pegembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	10	0				87.401.030		376.422.450			0	87.401.030	20	569.155.526,00	200,0%	#DIV/0!	Distan
		Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			0				67.785.000		73.403.450				67.785.000		67.785.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Distan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1

Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana, yang membawahi :
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
 - g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
 - h. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat; koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
 - d. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;

- e. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - i. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
 - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
 - n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan..

4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;

- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten; penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan IKK. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari proses Rencana Strategis (Renstra) yakni Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Potensi Sumberdaya Alam, SDM, Iptek dan Peraturan Perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi sampai saat ini, Propenas, Propeda, Renstra Kabupaten dan Lingkungan Strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan strategi juga untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK Output	Realisasi Capaian Th 2024	Catatan Analisis
1	Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun sampai dengan bulan Juni tahun 2024	-			
		-	Sarana Pertanian yang diberikan	5,51%	Total lahan yang sudah terlindungi AUPP dibagi total luas tanam
			Prasarana pertanian yang digunakan	5 paket	
			Penerbitan izin usaha pertanian		
			Persentase prasarana yang digunakan	17,30%	Persentase penyaluran pupuk Urea, NPK dan NPK formula khusus
			Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota		
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase	-			

	kasus zoonosis kab/ kota tahun 2024				
		-	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana		

2.2.1 Kondisi Pelayanan

Kinerja Pelayanan OPD Pertanian Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Capaian kondisi pelayanan di OPD Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Tabanan merupakan sentra pertanian di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk pertanian, maka secara bertahap, petani di Tabanan telah menerapkan pengolahan pertanian dengan sistem organik. Dengan memperhatikan kelestarian, kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai suatu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Dalam upaya membangun dan mengembangkan pertanian organik di Bali khususnya di Tabanan, masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah masih adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik di lapangan oleh berbagai "*stake holder*", maraknya klaim organik oleh pelaku usaha yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk organik, perbedaan proses sertifikasi serta potensi dan peluang pasar yang tersedia.

2. Pelayanan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Untuk mewujudkan Agrobisnis pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura dan pertanian organik serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

petani melalui terpenuhinya jumlah sarana jalan usaha tani dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik, terdatanya lahan pertanian, dan terpenuhinya sarana prasarana pupuk dan pestisida. Sasarannya adalah petani tanaman pangan / subak dan perkebunan.

3. Pelayanan Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan melayani peningkatan sumber daya perkebunan melalui meningkatkan produksi produktivitas dan mutu komoditas perkebunan yang meningkatkan ketersediaan benih unggul bermutu untuk perluasan areal perkebunan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dan ekspor hasil perkebunan.

4. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tabanan merupakan sentra peternakan unggas, sapi dan babi bagi Provinsi Bali. Adanya penyakit hewan menular seperti penyakit Jembrana, Avian influenza (AI)/Flu burung, SE, New Castle Deases, Rabies dan lain-lain merupakan ancaman bagi peternak karena bisa menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya wabah penyakit hewan menular, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak. Disamping itu, langkah-langkah dan tindakan yang berkesinambungan telah dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengobatan, vaksinasi, survailans, monitoring epidemiologi dan pengawasan obat hewan. Disamping itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produktivitas dan reproduktivitasnya dapat optimal yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Selama lima tahun terakhir ini Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan tidak saja melalui sumber dana APBD II, tapi juga melalui sumber dana APBD I, APBN dan FAO (Food and Agriculture Organization). Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pengobatan dan vaksinasi yang telah dilaksanakan.

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB). Dengan keberhasilan dari IB diharapkan menghasilkan bibit-bibit yang bermutu yang nantinya tentu dapat menguntungkan petani ternak. Jumlah petugas IB di Kabupaten Tabanan sebanyak 67 orang sedangkan yang aktif sekarang sebanyak 52 orang sehingga diperlukan penyegaran dan pelatihan petugas IB kembali. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan container, N₂ Cair, Inseminasi Kit, kandang jepit dan strow sapi Bali sangat diperlukan. Untuk mendukung program tersebut disamping melalui dana APBD II, juga didukung dari dana APBN dan APBD I.

b. Pelayanan Rumah Potong Hewan Gubug Tabanan

Kegiatan Operasional Rumah Potong dilaksanakan untuk mengkonsentrasikan pemotongan di Rumah Potong. Berdasarkan fungsinya Rumah Potong Hewan Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasaran. Dengan adanya Rumah Potong Hewan dapat memudahkan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong, menghindari pemotongan ternak yang sakit ataupun mati yang terkena

penyakit-penyakit hewan yang bersifat zoonosis, memudahkan pemeriksaan daging hasil pemotongan, meminimalkan pemotongan di rumah-rumah khususnya di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini pelayanan di Rumah Potong Hewan belum maksimal karena petugas untuk melaksanakan pemotongan (jagal) belum mampu untuk mengoperasikan alat tersebut.

5. Pelayanan Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mengkoordinir penyuluh yang mampu memberikan pendampingan serta rekomendasi terhadap petani maupun peternak untuk kemajuan serta perkembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian juga telah mampu meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar dan teknologi pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian adalah menumbuhkan dan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pertanian adapun Isu-isu penting yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
3. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan cenderung berkurang karena adanya proses alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki ekonomi sewa lahan yang tinggi.
4. Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun

5. Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau), disamping itu juga terjadi konversi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis)
6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (alsintan) tanaman pangan dan hortikultura
7. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura
9. Masih terbatasnya kemampuan petani untuk akses permodalan dan teknologi
10. Perubahan iklim global, berakibat terjadinya perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura
11. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
12. Masalah Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
13. Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya
14. Masih kurangnya kualitas SDM petani ternak dan semakin terbatasnya sumber daya manusia petani muda yang kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
15. Belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak (penyediaan bibit belum optimal) dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pakan ternak.
16. Masih adanya beberapa penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis (rabies dan flu burung).
17. Fluktuasi harga komoditi ternak terlalu besar dan tidak sesuai dengan perkembangan harga pakan
18. Semakin terbatasnya sumber daya alam untuk pengembangan peternakan.

2.4 Riview Terhadap Rencana kerja awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan musrenbang, forum –forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum -forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing –masing. Pada akhir tahun anggaran 2023, pemerintah

daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil –hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tabel T-C.31
Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tabanan

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan penting
				41.374.456.827					41.374.456.827	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	33.153.683.867	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	33.153.683.867	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tabanan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tabanan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	30.361.391.399	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	30.361.391.399	
Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	341.076.082	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab Tabanan	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	341.076.082	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	250.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tabanan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.881.178.725	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tabanan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1.881.178.725	
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tabanan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	309.635.200	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tabanan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	309.635.200	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab Tabanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	2.320.583.404	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab Tabanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	2.320.583.404	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab Tabanan	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	70%	2.044.474.631	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab Tabanan	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	70%	2.044.474.631	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tabanan	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	6 jenis	226.108.773	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tabanan	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	6 jenis	226.108.773	

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	Kab Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	50.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	Kab Tabanan	Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	50.000.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab Tabanan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10%	5.059.315.464	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab Tabanan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10%	5.059.315.464	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab Tabanan	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	644.718.885	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab Tabanan	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	644.718.885	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab Tabanan	Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	157 unit	4.414.596.579	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab Tabanan	Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	157 unit	4.414.596.579	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab Tabanan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	544.669.855	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab Tabanan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	544.669.855	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Kab Tabanan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	21000 ekor	500.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Kab Tabanan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	21000 ekor	500.000.000	

kabupaten/ kota		Masyarakat Veteriner			kabupaten/ kota		Masyarakat Veteriner			
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab Tabanan	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	150 dokumen	44.669.855	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab Tabanan	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	150 dokumen	44.669.855	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab Tabanan	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	65%	301.606.698	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab Tabanan	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	65%	301.606.698	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab Tabanan	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	45%	301.606.698	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab Tabanan	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	45%	301.606.698	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Tabanan harus terus ditingkatkan. Melalui musrenbang tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat. Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2023. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah di Bidang Pertanian karena sebagian besar mata pencaharian atau soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan Wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Pertanian melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2026	
					Target	Rp
						APBD
		URUSAN PERTANIAN				32.431.577.600
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	27.829.787.017
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5.000.000
			Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah Dokumen	2 Dokumen	3.000.000

				Perencanaan Perangkat Daerah		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	22.428.726.000
			Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 orang/bulan%	22.426.226.000
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0%	0
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.500.000
			Administrasi Umum Perangkat daerah		100%	171.830.200
			Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.499.500
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Jumlah Paket Peralatan	1 Paket	5.401.700,

				Rumah Tangga yang Disediakan		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	0
				Penyediaan Bahan/Material Indikator: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	24.929.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000,
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	99.748.500
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.748.500
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.209.893.456,

			Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.660.000
				Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	200.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	999.233.456,
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	139.947.400,
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	89.996.900,
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	49.950.500
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			10%	2.740.000.000,
Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan	Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		65%	1.250.000.000,

	Peternakan				
		Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	800.000.000,
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator:Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	450.000.000
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya		5 jenis	325.000.000,
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	0
			Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	325.000.000
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain		15 ekor	1.165.000.000
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah bibit ternak yang	15 ekor	1.165.000.000,

				sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			10%	7.381.000.000,
Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Pengembangan Prasarana Pertanian indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		58%	791.000.000,0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		591.000.000
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota			200.000.000
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Indikator: Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			
			Pembangunan Prasarana Pertanian		137 unit	6.590.000.000
			Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	17 unit	2.500.000.000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 unit	0
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan	9 unit	3.590.000.000

				Dipelihara		
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Indikator: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan	14 unit	100.000.000
				Dipelihara		
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Pintu Air dalam Kondisi Baik	18 unit	100.000.000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Indikator: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 unit	0
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	10 unit	200.000.000
				Dipelihara		
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	3 unit	100.000.000
				Dipelihara		
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			96%	295.000.000
Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan	Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota		6000 ekor	295.000.000

	masyarakat veteriner	masyarakat veteriner				
			Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	10 Laporan	250.000.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		110 dokumen	45.000.000
			Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	110 dokumen	45.000.000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh			60%	225.000.000,
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		39%	225.000.000,
			Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 unit	100.000.000
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan	10 unit	75.000.000

				Indikator: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yakni 8 (delapan) agenda prioritas atau Asta Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Keterkaitan RPJMN dan RPJMD merupakan dasar perencanaan pembangunan. Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program peningkatan produksi pangan, hasil nyatanya berupa swasembada padi, jagung, cabai, dan bawang merah dalam kurun waktu yang singkat. Dalam kurun tiga tahun sejak 2014,

produksi padi, jagung, cabai, dan bawang merah terus meningkat. Di antara beberapa komoditas tersebut, yang semula impor, berbalik status menjadi ekspor. Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan yang telah ditempuh antara lain Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang perubahan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, refocusing anggaran pada komoditas pangan strategis dan infrastruktur pertanian, program UPSUS, bantuan benih pada lokasi yang tidak existing, pemberlakuan reward and punishment dalam pelaksanaan penganggaran, implementasi asuransi pertanian, dan penetapan HET dan HPP, juga termasuk pembentukan satgas pangan. Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan swasembada, bahkan mengembangkannya pada komoditas potensial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	2.1	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan
		2.2	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian
		2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan
		2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Sumber: RPJMD Kab. Tabanan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. menurut permendagri 54 Tahun 2010, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran dalam prioritas (Permendagri 54 Tahun 2010).

Ketidakcapaian program dan kegiatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini dapat berasal dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun faktor eksternal. Analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif, sehingga program dan kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan di masa mendatang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		DINAS PERTANIAN			34.696.145.556,00						41.301.366.030,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			34.696.145.556,00						41.301.366.030,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			34.696.145.556,00						41.301.366.030,00	
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.055.145.556,00						32.495.891.399,00	
	3.27.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	5.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01. 2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01. 2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	100 %	22.428.726.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	30.353.891.399,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	119 Orang/bulan	22.426.226.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	30.351.391.399,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	100 %	171.830.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	196.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	1.499.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01. 2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	5.401.700,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	6.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	70.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	7.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	12 Paket	60.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	24.929.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	100 %	99.748.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit	99.748.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	100 %	1.209.893.456,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	1.461.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01. 2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan	10.660.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	11.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	999.233.456,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	100 %	139.947.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	40 Unit	89.996.900,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	49.950.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	2.740.000.000,00						2.799.474.631,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Persentase Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian</i>	70 %	1.250.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.644.474.631,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi										

			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	1 Laporan	800.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.044.474.631,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian										
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	10 Laporan	450.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengelolaan Sumber Daya</i>	5 jenis	325.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman										
			<i>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>	4 Dokumen	325.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak</i>	8500 dan 15 pohon,stek dan ekor	1.165.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain										
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>	15 Ekor	1.165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	7.381.000.000,00						4.910.000.000,00	

	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik</i>	60 %	791.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian	420.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya										
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	2 Laporan	591.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota										

			<i>Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</i>	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian	220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik</i>	157 unit	6.590.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.490.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										

			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	9 Unit	3.590.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit										
			<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	14 Unit	100.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air										

			<i>Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	18 Unit	100.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya										
			<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	10 Unit	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										

			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani										
			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>	17 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	295.000.000,00						546.000.000,00	

	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	6000 ekor	250.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i>	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan produk Hewan</i>	110 dokumen	45.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	-	46.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan										
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>	150 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	-	46.000.000,00	DINAS PERTANIAN

5,	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	225.000.000,00						550.000.000,00	
	3.27.07. 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan Yang Berhasil Meningkatkan Kelas</i>	45 %	225.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07. 2.01.000 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	10 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.07. 2.01.000 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa											
			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	10 Unit	75.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07. 2.01.000 5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>	2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 1. Ketahanan Pangan	Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	J U M L A H					34.696.145.556,00		41.301.366.030,00					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Target Kinerja 2026

Ditahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 90 tahun 2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2026 seperti yang di tampilkan pada

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2026

PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
		100%	Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Peningkatan Produktivitas	65%	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian

PENGEMBAAN SARANA PERTANIAN	Komoditas Pertanian	5 jenis	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya
		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	58%	Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik
		137 unit	Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	17000 ekor	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		140 dokumen	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	39%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas

4.2 Rencana Kerja Kegiatan 2026

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat.

Dinamisasi perencanaan kinerja maka Dinas Pertanian telah melakukan analisa perencanaan anggaran yang berproses dari perencanaan

partisipatif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2026 disampaikan pada berikut.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Pertanian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Ditahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapaikinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2026. Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan. Untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada, berikut adalah rencana tindak lanjut yang direkomendasikan:

1. Peningkatan Kapasitas Petani:

Melalui Pelatihan dan Pendampingan. Mengadakan pelatihan rutin mengenai teknik pertanian modern, manajemen keuangan, dan pemasaran produk. Program pendampingan intensif oleh ahli pertanian juga diperlukan untuk membantu petani mengadopsi praktik-praktik baru.

Studi Banding: Memfasilitasi kunjungan studi banding ke daerah atau negara lain yang memiliki praktik pertanian maju. Hal ini akan memberikan wawasan

baru dan motivasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas pertanian mereka.

2. Pengembangan Infrastruktur Pertanian:

Membangun dan memperbaiki sistem irigasi untuk memastikan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun. Meningkatkan kualitas jalan usaha tani untuk mempermudah aksesibilitas dan mengurangi biaya transportasi hasil pertanian. Menyediakan fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mengurangi kerugian pasca panen dan menjaga kualitas produk.

3. Penerapan Teknologi Pertanian:

Melalui Pertanian Presisi. Mendorong penggunaan teknologi pertanian presisi seperti sensor tanah, drone, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan produktivitas. Benih Unggul dengan memastikan ketersediaan benih unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki produktivitas tinggi. Pupuk Organik dengan Menggalakkan penggunaan pupuk organik dan bio-pestisida untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

4. Penguatan Kelembagaan Petani:

Melalui koperasi Pertanian guna mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi pertanian yang kuat dan mandiri. Koperasi dapat membantu petani dalam pengadaan input pertanian, pemasaran produk, dan akses permodalan. Asosiasi Petani dengan memfasilitasi pembentukan asosiasi petani yang dapat menjadi wadah untuk advokasi kebijakan dan berbagi informasi.

5. Kebijakan yang Mendukung:

Subsidi dan Kredit dengan menyediakan subsidi pupuk dan benih serta kredit dengan bunga rendah untuk membantu petani meningkatkan produksi. Jaminan Harga dengan menerapkan kebijakan jaminan harga untuk melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang merugikan. Perlindungan Lahan dengan menerbitkan regulasi yang melindungi lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non-pertanian.

6. Pemasaran dan Distribusi:

Platform Digital dengan membangun platform digital untuk menghubungkan

petani langsung dengan konsumen atau pasar yang lebih luas. Kemitraan dengan mendorong kemitraan antara petani dengan perusahaan pengolahan makanan, supermarket, dan restoran untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan.

Dengan implementasi rencana tindak lanjut ini secara komprehensif, diharapkan sektor pertanian dapat menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1117/03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan persiapan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun 2026;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi secara efektif dan berkelanjutan baik internal maupun eksternal dalam kebutuhan penyusunan dokumen dimaksud; dan
 - c. melaporkan hasil penyusunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 28 Nopember 2024

an-BUPATI TABANAN
KEPALA KABUDINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,

NANDHUSUBAGIA, S.PI, M.M
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kabupaten Tabanan;
7. Camat se-Kabupaten Tabanan;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1117/03/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
- Ketua : Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan.
- Anggota : Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan.

an BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN

MADE SUBAGIA, S.PI, M.M
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196603081989031012



පිළිතුරු දුන්නාණ්ඩ
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
පිළිතුරු දුන්නාණ්ඩ
DINAS PERTANIAN

පිළිතුරු දුන්නාණ්ඩ
JALAN GATOT SUBROTO II, NOMOR 1, TELEPON : (0361) 810937
Website: <http://distan.tabanankab.go.id> dan Email: distan@tabanankab.go.id
Sanggulan - Tabanan

Tabanan, 9 Desember 2024

Nomor : 900/ 13867 / Sekret / Distan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembahasan Ranwal Renja 2026
Yth : Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

Dalam rangka penyusunan rancangan awal Renja tahun 2026 pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, maka diharapkan kehadiran saudara dengan membawa dokumen usulan kegiatan tahun 2026 pada:

Hari : Selasa 10 Desember 2024
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Distan

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Tabanan

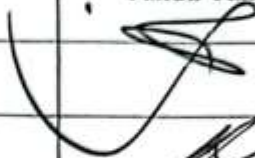
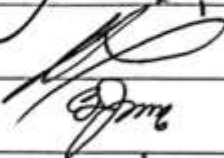
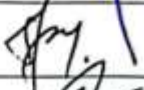
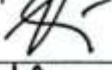
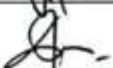
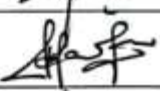
I Made Subagia, S.Pi., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Desember 2024

Tempat : Ruang Rapat Distan

Prihal : Rapat Penyusunan Ranwal Renja 2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Made Subagio	Kadei	
2	I Made Arya Putra.	Kelidic.	
3	I Nyoman Sueraya	Keloid TP+H	
4	Gde Eka Panta Ariana	Keloid PK+H	
5	I-GST-A-Gintin Opaturanti	Keloid Bun	
6	Satri Dewi Indrawati	Kabid Perencanaan	
7	Ni Putu Winda Astuti	JP	
8	Ni Nyoman Prasant	Kabid PSP	
9	Ni Putu Asri Wahyuni	Keb Umum & Keu	
10	Ni Md Citra Laksmi	Staf Perencanaan	

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Ni Putu Asri Wahyuni, S.P.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197503192005012000



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
මහලයා මාවත
DINAS PERTANIAN

රාජ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය
JALAN GATOT SUBROTO II, NOMOR 1, TELEPON : (0361) 810937
Website: <http://distan.tabanankab.go.id>, dan Email: distan@tabanan.go.id
Sanggulan - Tabanan

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Pembahasan Ranwal 2026
Hari / Tanggal : Selasa, 10 Desember 2024
Jam : 09.00 wita
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Rapat dibuka oleh : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
Peserta Rapat :

- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- JF Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Hal yang Dibahas :

- Capaian Kinerja
- Rencana Kerja Tahun 2026

Kesimpulan : Rencana kerja awal tahun 2026 akan disusun berdasarkan hasil rapat dengan disesuaikan dengan renstra Dinas Pertanian tahun 2021-2026. Capaian kinerja yang diperlukan adalah capaian kinerja tahun 2021 mengingat tahun 2022 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja.

Demikian notulen rapat ini di sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan, 10 Desember 2024
PPTK Kegiatan

Ni Putu Asri Wahyuni, S.P.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197503192005012000